



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 193040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **891.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/119 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/32 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **103.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 11B1D M/T SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA NF 100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **68.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **6.079.134**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.069.079.134

III. HUTANG

Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.044.079.134

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.